

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Setiap wilayah mempunyai potensi lokal yang berbeda-beda baik itu sumber daya manusia atau sumber daya alamnya serta memiliki ciri khas yang tertentu serta cara yang berbeda dalam mengelola hasil sumber daya yang ada. Sumber daya pada suatu daerah menunjukkan mata pencaharian suatu masyarakat. Selain itu sumber daya yang ada disekitarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Walaupun demikian potensi yang dimiliki tidak ada artinya jika tidak dikembangkan dengan baik dan tepat.

Kekayaan potensi tersebut mampu memberikan manfaat yang melimpah untuk kemakmuran ekonomi masyarakat setempat, sumber daya yang baik akan mendatangkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Namun, realitanya kekayaan sumber daya yang melimpah tersebut malah sebaliknya kurang memberi manfaat bagi masyarakat, bukan karena rendahnya kualitas sumber dayanya, melainkan karena rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal.<sup>1</sup>

Kemiskinan merupakan masalah kronis yang dialami Indonesia. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan tetapi

---

<sup>1</sup> Eka Safitri, "Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Lokal Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h.5-6.

dampak keberhasilan dirasa belum begitu terlihat hasilnya, belum sesuai yang diharapkan, dan hal ini terjadi karena banyaknya program pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran. Untuk itu diperlukan cara yang berkesinambungan untuk dapat mengatasi kemiskinan dalam program pembangunan nasional yang berkelanjutan.<sup>2</sup>

Islam juga memandang kemiskinan sebagai penyakit yang harus disembuhkan, karena kemiskinan dekat dengan kekufuran. Salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah cara dan metode yang digunakan individu, kelompok dan komunitas sehingga mereka menjadi mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka sendiri, dan dengan demikian mampu bekerja dan membantu satu sama lain untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka.<sup>3</sup>

Al Quran kemudian menawarkan sebuah solusi guna mengubah kesenjangan dalam rizki tersebut menjadi sumber kebaikan dan kerukunan. Al Quran banyak mengandung ayat-ayat yang mengajak manusia untuk bersama-sama berkontribusi memberdayakan masyarakatnya guna mengentaskan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif karena dalam program pemberdayaan masyarakat didorong untuk mengubah diri mereka sendiri dan dilatih untuk mandiri. Islam

---

<sup>2</sup>Rihanah Daulay, "Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Di Kota Medan", *MIQOT*, Vol. 40, No. 1, (Januari-Juni 2016), h.45.

<sup>3</sup>Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an", *Ilmu Dakwah*, Vol. 39, No. 1, (2019), h.32.

sangat mendorong dan menganjurkan pemeluknya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan semangat Islam dan umatnya untuk menjadi agama yang rahmatan lil ‘alamin. Islam mempunyai visi agar pemeluknya menjadi agen penyebar rahmat Allah dimuka bumi ini. Allah SWT berfirman: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al Anbiya [21]:107).<sup>4</sup>

Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu berkembang dan memiliki mutu hasil. Pengenalan teknologi menjadi penting dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada para masyarakat yang masih tradisional.

Dalam Al Quran terdapat banyak ayat yang membicarakan tema pemberdayaan masyarakat salah satunya dalam surat Al Fajr, (Qs. 89: 17-18) Allah membentak orang-orang Jahiliah yang mengatakan bahwa agama mereka justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka, Ibrahim; "Tidak, tetapi kalian tidak menghormati anak yatim dan tidak saling mendorong memberi makan orang miskin. Kaum lemah (dhu'afa) atau kaum yang terlemahkan seringkali menjadi korban ketidakpedulian masyarakat pada mereka. Kekurangan yang mereka miliki terutama di bidang ekonomi telah

---

<sup>4</sup>Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan, ....., h.33.

membuat mereka berposisi lemah, baik di lingkungan mereka bahkan pada sistem yang ada di masyarakat atau pemerintahan setempat.<sup>5</sup>

Dalam pengelolaan potensi sumber daya lokal baik sumber daya dari alam maupun sumber daya limbah tidak terpakai atau dalam hal ini adalah sumber daya buatan di pedesaan, banyak masyarakat yang memanfaatkannya dengan cara sederhana, yang rata-rata adalah *home industry* dan usaha kecil dan menengah. Usaha skala kecil dan menengah di daerah selama ini sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial di daerah itu sendiri, seperti tingkat kemiskinan yang tinggi; jumlah pengangguran yang besar, terutama bagi golongan masyarakat yang berpendidikan rendah; ketimpangan distribusi pendapatan; proses pembangunan yang tidak merata antara kota dengan desa serta masalah urbanisasi dengan segala aspek negatifnya. Artinya keberadaan usaha kecil dan menengah di daerah diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut.

Untuk sektor industri usaha kecil menengah, membuat berbagai macam produk yang menghasilkan barang-barang kebutuhan konsumsi dan barang setengah jadi yang akan dipakai sebagai bahan baku industri hilirnya. Untuk jenis-jenis barang konsumsi tertentu seperti makanan dan minuman, pakaian jadi, tekstil, alas kaki, dan alat-alat rumah tangga, usaha kecil menengah tetap dapat bertahan di pasar dan bahkan menikmati pertumbuhan volume produksi yang lumayan setiap tahunnya, walaupun usaha kecil menengah menghadapi persaingan

---

<sup>5</sup>Muhammad Najib Sagala, “Konsep Al-Qur’an Tentang Pemberdayaan Ekonomi (Pendekatan Tafsir Al-Misbah)”, (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), h.4.

yang ketat dengan industri skala besar yang juga membuat jenis-jenis barang yang sama.

Dari kedua skala usaha yang menghasilkan produk sama namun dari sisi lain menunjukkan perbedaan. Perbedaan tersebut bisa saja dalam hal warna, bentuk, rasa, kemasan, harga, atau pelayanan. Dengan perkataan lain, walaupun jenis barangnya sama usaha kecil menengah memiliki pasar tersendiri yang melayani kelompok pembeli tertentu. Untuk jenis-jenis produk tertentu pada umumnya barang-barang konsumsi sederhana hasil dari usaha kecil menengah memiliki segmentasi pasar sendiri yang melayani kebutuhan kelompok konsumen tertentu, pada umumnya dari kalangan kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, usaha kecil menengah memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah memerangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, usaha kecil menengah dapat terus berperan secara optimal dalam upaya menanggulangi pengangguran yang jumlahnya terus meningkat.<sup>6</sup>

Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.<sup>7</sup> Lembaga ini memanfaatkan teknologi yang dapat membantu kegiatan

---

<sup>6</sup>Binta Gunawan, "Proses Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna", (*Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2014), h.2.

<sup>7</sup>Audia Arsyad Nurwinendra, "Analisis Pelaksanaan Program Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Bapermades) Provinsi Jawa Tengah", *Public Policy and Management Review*, Vol. 5, No. 2, (2016), h.2.

usaha masyarakat di Kelurahan Kedaleman, dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakatnya. Posyantek Madani memfokuskan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kedaleman bagi mereka yang memiliki keterampilan dan potensi dalam berwirausaha.

Untuk itu Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Madani Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah lembaga yang membantu masyarakat dengan tujuan meningkatkan perekonomian, keterampilan dan kemandirian masyarakat agar mereka dapat memiliki penghasilan serta keterampilan dan potensi dalam berwirausaha yaitu dalam program Industri Kecil Menengah (IKM) di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon. Posyantek Madani berdiri sejak tahun 2017 di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Pada awal tahun 2019 Posyantek Madani sudah mempunyai kantor sendiri di sebelah kelurahan tersebut sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat jika ingin berkonsultasi dengan pihak Posyantek Madani.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saya tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Madani dalam Program Industri Kecil Menengah (IKM) (Studi Kasus Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon)”**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kondisi masyarakat pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon?
2. Bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Posyantek Madani dalam program Industri Kecil Menengah (IKM)?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dengan mengacu pada permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Posyantek Madani dalam program Industri Kecil Menengah (IKM).

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Posyantek Madani di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada:

### a. Bagi peneliti

Agar penulis atau peneliti dapat memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam hal pengembangan masyarakat.

### b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya.

### c. Bagi akademisi

Hasil penelitian atau kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi akademisi, baik dikalangan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun pihak-pihak lain.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa penelitian yang sudah mengkaji tentang tema serupa, diantaranya adalah:

*Pertama*, Muetia Endriani, Abdullah Said, Mochammad Chazienul Ulum dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi)” di muat



dalam jurnal *Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 12.<sup>8</sup> Kesimpulan yang didapatkan dari jurnal tersebut yaitu, dalam proses pengambilan data yang dilakukan hanya pada rencana strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana BPMPKB dalam jurnal ini membahas tentang penelitian yang dilakukan di kantor BPMPKB dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi saja.

Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan pada penelitian yang dikaji oleh saya dalam penelitian pemberdayaan masyarakat yaitu melalui Posyantek Madani dalam program Industri Kecil Menengah (IKM), dalam strategi pemberdayaan ini saya melakukan penelitian langsung kepada masyarakat yang diberdayakan oleh Posyantek Madani dalam program Industri Kecil Menengah (IKM) yang berada di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

*Kedua*, Binta Gunawan dengan judul “Proses Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna” di muat dalam skripsi Universitas Negeri Semarang, 2014.<sup>9</sup> Kesimpulan yang didapatkan dari skripsi tersebut yaitu penulis hanya meneliti satu program UKM yang dibantu oleh lembaga Posyantek dengan memberikan bantuan berupa Teknologi tepat guna yaitu alat pembuat keripik kerupuk kulit ikan dan keripik pisang.

Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan pada penelitian yang dikaji oleh saya dalam meneliti Posyantek Madani yaitu melalui program Industri Kecil Menengah (IKM) di mana Posyantek Madani

---

<sup>8</sup>Muetia Endriani, dkk, “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi)”, *Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 12, h.1997.

<sup>9</sup>Binta Gunawan, “Proses Pemberdayaan ...”, h.13.

mencoba membantu dan membina masyarakat dengan memberikan pelatihan berwirausaha seperti pengemasan, pemasaran dan lain-lain, serta memperkenalkan beberapa teknologi tepat guna yang bisa di gunakan dalam Industri Usaha Kecil Menengah (IKM) agar memudahkan para pelaku IKM dalam berwirausaha.

*Ketiga*, Fitria Waluyo dengan judul “Strategi Pengembangan Mikro Kecil dan Menengah” di muat dalam skripsi Universitas Lampung, 2018.<sup>10</sup> Kesimpulan yang didapatkan dari skripsi tersebut yaitu, terdapat 34 unit usaha yang berdiri pada tahun 2010 di fokuskan pada industri kecil keripik mulai dari keripik singkong, keripik ubi, keripik tempe dan lain-lain, dalam penelitian tersebut penulis menggunakan strategi konsentrasi melalui integritas horizontal dengan kata lain yang bersifat defensif (Strategi ST) yang berguna melindungi produk dan pasarnya dari serangan persaingan.

Berdasarkan hal tersebut maka adanya peberdaan pada penelitian yang dikaji oleh saya dalam meneliti Posyantek Madani yaitu melalui program Industri Kecil Menengah (IKM), terdapat 10 IKM dengan berbagai macam jenis usaha diantaranya seperti, kerupuk kulit sapi, gipang, bawang goreng dan lain-lain yang dibina oleh Posyantek Madani yang berdiri sejak tahun 2014.

*Keempat*, M. Taufiq Akbar, Lely Indah Mindarti, Minto Hadi dengan judul “Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri Kerupuk Rengginang” di muat dalam jurnal *Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 11.<sup>11</sup> Kesimpulan yang dapat diambil dari

---

<sup>10</sup>Fitria Waluyo, “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, (*Skripsi*, Universitas Lampung, 2018), h.10.

<sup>11</sup>M. Taufiq Akbar, dkk, “Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri Krupuk Rengginang”, *Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 11, h.1.

skripsi tersebut adalah Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam memberdayakan Pengusaha Rengginang adalah dengan memberikan bantuan alat penunjang produksi, kemudahan pengurusan perizinan, pelatihan keterampilan, serta pemasaran produk. Dalam pemberdayaan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan ini secara positif sangat didukung karena merupakan pelestarian makanan tradisional banyak serta melimpahnya tenaga kerja. Hambatan dalam pengembangan usaha kerupuk rengginang tersebut adalah mahalnya harga bahan baku, serta tidak adanya kelompok usaha atau paguyuban.

Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan pada penelitian yang dikaji oleh saya dalam meneliti pemberdayaan melalui IKM adalah pemberdayaan dilakukan oleh Kelurahan Kedaleman yang diberdayakan oleh Posyantek Madani. Posyantek Madani memberdayakan beberapa IKM diantaranya makanan tradisional dan modern, bukan hanya makanan ringan, tetapi ada juga berbagai macam macam kue basah.

*Kelima*, Dwi Hapsari Nur Arofah dengan judul “Peran Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna) Dalam Pemberdayaan Masyarakat” di muat dalam skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. Dampak dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh Posyantek Tekno Mitra Giri telah dapat meningkatkan pengetahuan, kemandirian dan ekonomi, terutama pada produktivitas dan keterampilan dalam menjalankan usaha. Walau terhambat oleh pandangan awal yang negatif dari masyarakat akan kedatangan Posyantek dalam kelompok mereka, namun seiring dengan pemahaman yang diberikan maka program yang dilakukan oleh

Posyantek Tekno Mitra Giri Wonogiri berhasil dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Selain itu pemilihan kepala desa atau tokoh masyarakat sebagai *opinion leaders* membantu Posyantek untuk masuk dan mensosialisasikan TTG pada masyarakat, menjadi salah satu faktor pendukung komunikasi pembangunan.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan pada penelitian yang dikaji oleh saya dalam meneliti pemberdayaan melalui Posyantek Madani ini adalah posyantek yang tidak berfokus pada komunikasi, melainkan pada pemberian alat-alat penunjang IKM, Posyantek Madani sendiri hadir dan memperkenalkan kepada masyarakat bahwa posyantek ini ada untuk dapat membantu mengembangkan IKM warga melalui alat alat tepat guna yang telah diberikan dan diperkenalkan.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Pemberdayaan Masyarakat**

#### **a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.<sup>13</sup> Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu

---

<sup>12</sup>Dwi Hapsari Nur Arofah, "Peran Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna) Dalam Pemberdayaan Masyarakat", (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), h.19.

<sup>13</sup>Riska Ayu Pratiwi, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Up2k-Pkk) di Kelurahan Tejosari, Kota Metro", (*Skripsi*, Universitas Lampung, 2017), h.10.

proses atau cara untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas masyarakat. Melalui suatu kegiatan, yaitu melakukan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang disesuaikan dengan keadaan dan karakteristik di masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah pengetahuan serta penghasilannya, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan diri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>14</sup>

Salah satu prinsip penting dari pengembangan masyarakat adalah prinsip keswadayaan, yang diturunkan langsung dari prinsip ekologis keberlanjutan. Keswadayaan berarti bahwa masyarakat pada hakekatnya bergantung pada sumber daya mereka sendiri, ketimbang bergantung pada sumber daya yang diberikan secara eksternal.

---

<sup>14</sup>Andriyani Pamungkas, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Industri Kecil Batik Semarang<sup>16</sup> di Bukit Kencana Jaya Tembalang Semarang", (*Skripsi*, Universitas Semarang, 2010), h.1.

Salah satu kontradiksi dari banyaknya pengembangan masyarakat yang menggunakan retorika “perubahan dari bawah” adalah bahwa ia seringkali sangat bergantung pada pendanaan negara, dan karena itu justru pada negara kesejahteraan yang seharusnya digantikan. Ketergantungan yang demikian pada negara mungkin diperlukan, dalam jangka pendek.<sup>15</sup>

#### **b. Manfaat Pemberdayaan Masyarakat**

Salah satu manfaat besar dari pemberdayaan adalah memungkinkan perkembangan dan penggunaan bakat dan/atau kemampuan terpendam dalam setiap individu. Sudah banyak pekerjaan yang dirancang dan dibangun oleh suatu kelompok/organisasi dengan harapan bahwa anggota kelompok/organisasi tersebut bisa memanfaatkan kondisi dimaksud guna peningkatan kinerjanya, namun justru sedikit proporsi kemampuan mereka yang sudah mengarah kepada keputus-asaan dan alienasi yang besar.

Dengan pemberdayaan hambatan-hambatan tradisional dihilangkan, garis demarkasi disingkirkan dan deskripsi pekerjaan yang menghalangi dikesampingkan. Bagi orang yang diberdayakan, tentunya mengalami kondisi yang berbeda dari masa silam, mungkin ada perbaikan besar yang dirasakannya

---

<sup>15</sup> Jim Ife dan Frank Tesorier, *Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), cetakan ke-3, h.254-225.

dalam hubungan dengan sikap orang untuk mencari penghidupan.<sup>16</sup>

Salah satu dampak positif dari pemberdayaan adalah meningkatnya output dan kinerja. Masyarakat mampu mengambil tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka, mengaturnya agar sesuai dengan kebutuhan individu dan kemudian melaksanakannya tanpa campur tangan orang lain yang berimbas pada semakin besarnya efektivitas. Atas dorongan peningkatan kualitas, pemberdayaan telah memberikan kontribusinya.

Masyarakat yang diberikan misi manajemen mutu dan teknik, ketrampilan, dan metodologi yang dipakai, sudah menemukan kepuasan dan kepentingan yang lebih besar dalam kerja mereka dengan mencari perbaikan. Perbaikan yang lazim dan berkesinambungan merupakan bagian dari gaya manajemen suatu organisasi yang diterapkan mulai dari level paling atas sampai level bawah. Masyarakat saat ini mempunyai target dan tujuan bernilai yang akan dicapainya, terlepas dari tingkat outputnya setiap saat. Menjalin hubungan kerja yang kondusif dan mengetahui ukuran-ukuran kinerja yang dicapainya, akan membuat pekerjaan mereka lebih menyenangkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> A. Priyatna, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Pengukuran Keberdayaan Komunitas Lokal", *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, No. 2, tahun, 2008, h.1.

<sup>17</sup> A. Priyatna, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam, ..., h.1.

### c. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Konsep pemberdayaan masyarakat, banyak juga dikemukakan oleh ahli lain, yaitu salah satunya adalah Payne yang mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya, ditujukan guna: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.<sup>18</sup>

Konsep lain menyatakan bahwa memberdayakan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan program-program

---

<sup>18</sup>M. J. Maspaitella, Nancy Rahakbauwi, "Pembangunan Kesejahteraan Sosial ...", h.159-160.



pengembangan masyarakat secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapis bawah.<sup>19</sup>

#### **d. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.

Menurut Mardikanto 2014, terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan, dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
2. Perbaikan usaha, perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaikan pendapatan, dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
4. Perbaikan lingkungan, perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena

---

<sup>19</sup>Yayuk Sri Hidayat, "Implementasi Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), h.1.

kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5. Perbaiki kehidupan, tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaiki masyarakat, kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.<sup>20</sup>

#### e. Pengembangan Masyarakat Islam

Secara umum pengembangan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya

Menurut Twelvetrees PM adalah *the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions*. Secara khusus PM berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan.

---

<sup>20</sup> Muchlisin Riadi, "Tujuan, Prinsip, dan Tahapan Pemeberdayaan Masyarakat", (11 November 2017), h.2.

Menurut Definisi Ibnu Kaldun, secara etimologi pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas. Masyarakat Islam berarti kumpulan manusia yang beragama Islam, yang meneliti hubungan dan keterkaitan ideologis yang satu dengan yang lainnya. Dalam pemikiran sosiologis, Ibnu Kaldun menjelaskan bahwa manusia itu secara individu diberikan kelebihan namun secara kodrati manusia memiliki kekurangan. Sehingga kelebihan itu perlu dibina agar dapat mengembangkan potensi pribadi untuk dapat membangun.

Ada beberapa mengenai konsep dan tujuan pengembangan masyarakat Islam yang dinukilkan Ibnu Khaldun di dalam karya tulisnya yaitu:

a. Individu

Dalam pemikiran sosiologis, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia itu secara individu diberikan kelebihan. Namun secara qudroti manusia memiliki kekurangan dan kelemahan di samping kelebihan yang dimiliki. Sehingga kelebihan itu perlu dibina agar dapat mengembangkan potensi pribadi untuk dapat membangun.

b. Ashabiyah

Atau yang bisa juga disebut kekeluargaan merupakan sebuah kekuatan atas pertalian darah. Setiap patriotisme (solidaritas kekeluargaan). Sikap kekeluargaan ini jika dibina dan diarahkan kepada penanaman jiwa keagamaan maka akan menghasilkan sikap yang positif mengarah kepada sikap religius untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar.

c. Masyarakat Ijtima' al-Insani

Dengan sikap saling membutuhkan, tolong menolong dan solidaritas maka terciptalah sistem sosial masyarakat yang tergabung dalam al-ijtima' al insani. Berkaitan dengan pengembangan masyarakat Islam maka masyarakat di sini diarahkan kepada terbentuknya masyarakat yang Islami.

d. Negara

Negara dalam konteks ini adalah merupakan suatu wadah dan alat baik melalui pemimpin, konstitusi ataupun undang-undang untuk menciptakan tatanan masyarakat yang ideal sesuai dengan ajaran Islam.

e. Peradaban

Tujuan akhir dari pengembangan masyarakat Islam adalah terwujudnya masyarakat madani dengan nilai-nilai peradaban yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokratisasi, inklusifisme, independent, makmur dan sejahtera.<sup>21</sup>

## 2. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) adalah lembaga kemasyarakatan yang berada di tingkat Kecamatan dan berfungsi memberikan pelayanan teknis, informasi, promosi dan orientasi tentang Teknologi Tepat Guna (TTG). Menurut Hishiyama, Posyantek merupakan salah satu lembaga sosial yang dapat membantu menyelesaikan

---

<sup>21</sup> Muhtadi & Tantan Hermansah , *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, (Ciputat:UIN Jakarta Press, 2013), h.6-9.

permasalahan dalam lingkungan sosial dan perekonomian.<sup>22</sup> Posyantek Madani merupakan lembaga kemasyarakatan yang berada di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon telah berdiri sejak tahun 2017.

Tujuan adanya Posyantek adalah menginventarisasi, memberi pelayanan dan mensosialisasikan teknologi tepat guna kepada masyarakat, dengan keberadaan Posyantek di daerah, masyarakat usaha kecil dapat dengan mudah mendapat informasi dan pelayanan atas kebutuhan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produksi, kualitas produksi untuk mencapai produksi yang standar dan akhirnya akan mengarah kepada peningkatan produktivitas dan daya saing

#### **a. Ciri-ciri Teknologi Tepat Guna**

Sebagaimana telah dikemukakan pada kriteria dan syarat dan kesesuaian TTG, dapat dikemukakan ciri-ciri yang cukup menggambarkan TTG (walaupun tidak berarti sebagai batasan) adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan teknologi tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung pertanian, industri, pengubah energi, transportasi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di suatu tempat.
2. Biaya investasi cukup rendah/ relatif murah.
3. Teknis cukup sederhana dan mampu untuk dipelihara dan didukung oleh keterampilan setempat.

---

<sup>22</sup>Dwi Hapsari Nur Arofah, "Peran Posyantek ...", h.4.

4. Masyarakat mengenal dan mampu mengatasi lingkungannya.
5. Cara pendayagunaan sumber-sumber setempat termasuk sumber alam, energi, bahan secara lebih baik dan optimal.
6. Alat mandiri masyarakat dan mengurangi ketergantungan kepada pihak luar

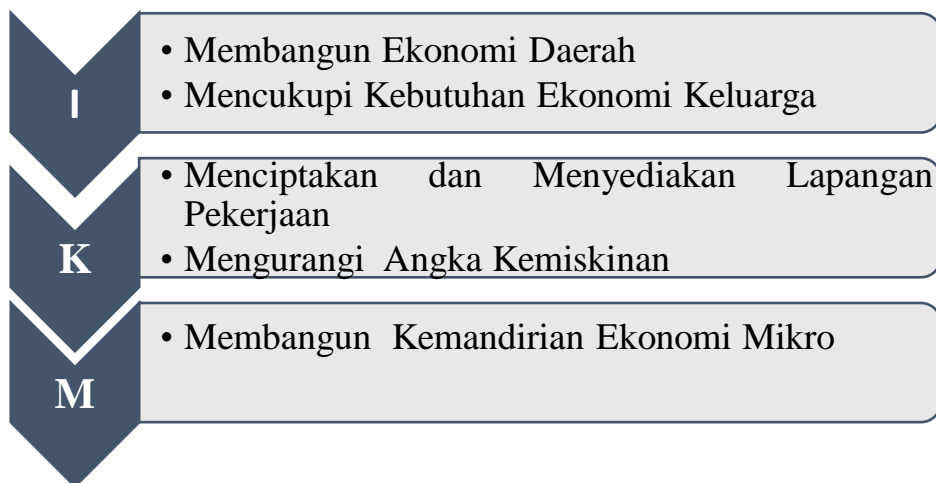
### **3. Industri Kecil Menengah**

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dijelaskan industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya. Sedangkan pengertian industri yang dikaitkan dengan proses pengolahan dan pengembangan industri yang digunakan sebagai dasar acuan dari pada Departemen Perindustrian, yaitu : industri adalah rangkaian kegiatan dan ekonomi yang meliputi pengolahan, pengerjaan, perubahan, perbaikan bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang yang berguna dan lebih bermanfaat untuk pemakaian dan usaha jasa yang menunjang kegiatan di atas.

Dalam perkembangannya industri kecil membawa misi pemerataan yaitu dengan penyebaran kegiatan usaha, peningkatan partisipasi bagi golongan ekonomi lemah, perluasan kesempatan kerja dan dengan pemanfaatan potensi ekonomi terbatas. Dalam rangka menunjang pembangunan

daerah, maka pembangunan industri kecil disebar luaskan ke seluruh wilayah melalui penetapan pusat pertumbuhan industri kecil, sentra industri, lingkungan industri.<sup>23</sup>

### Peran nyata IKM<sup>24</sup>



#### b. Manfaat Industri Kecil

Industri kecil juga memberi manfaat sosial yang sangat berarti bagi perekonomian yaitu:

- a. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik itu sandang, pangan, dan papan
- c. Terciptanya lapangan pekerjaan baru, semakin banyak jumlah industri yang dibangun maka banyak pula tenaga kerja yang diserap terutama pada industri padat karya

<sup>23</sup> Muh. Ridwan, Hartutiningsih, Mass'ad Hatuwe, "Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang", *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2014, h.192.

<sup>24</sup> Sasmito, Laporan Pelatihan Kewirausahaan & Kolaborasi IKM dengan Posyantek, 2019.

- d. Dapat meningkatkan pendapatan perkapita
- e. Dapat ikut serta mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi terutama sektor industri.<sup>25</sup>

#### **b. Kriteria Industri Kecil**

Kriteria industri kecil menurut UU RI No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil pasal 5 ayat 1 yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau,
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000
- c. Milik warga Negara Indonesia
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha besar
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perekonomian, yang diatur oleh peraturan pemerintah.

---

<sup>25</sup> Siska Ariyani Shofi, "Peran Industri Kecil Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), h.21.

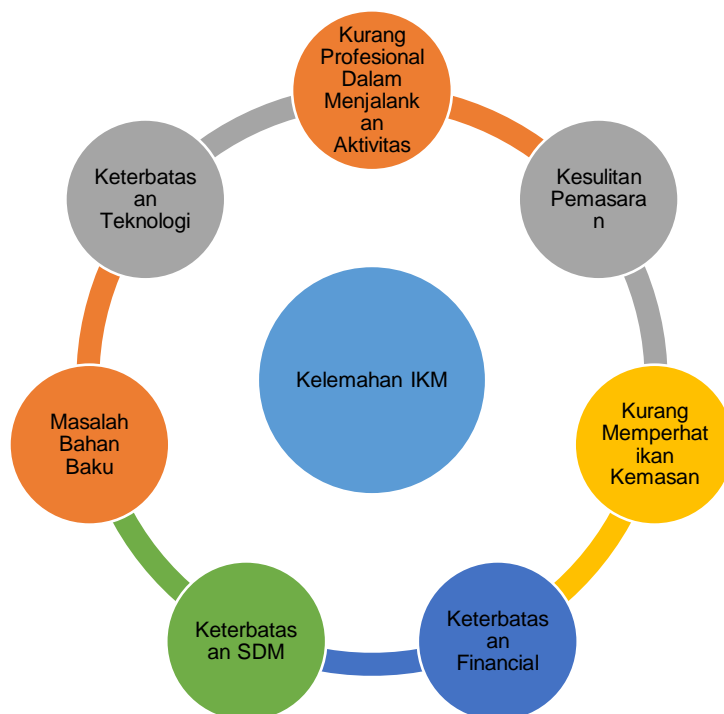


### c. Konsep Usaha Industri Kecil

Usaha industri kecil (mikro) sesungguhnya sudah ada sejak pemerintah Orde Baru, dan usaha tersebut dirumuskan dalam kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam perkembangannya sering terbentuk dengan masalah modal maka dengan keterbatasan yang dimiliki terutama modal usaha, sehingga sulit untuk berkembang. Agar usaha tersebut maka perlu suntikan modal usaha dan ditunjang dengan faktor sarana dan prasarana yang memadai.

Di samping itu diperlukan kemudahan-kemudahan yang mendorong berkembangnya usaha tersebut. Misalnya dalam penyederhanaan perizinan memperoleh modal usaha dan kesempatan usaha, juga kemudahan dalam mendapat kesempatan mengikuti pelatihan. Untuk mewujudkan akses (kemudahan) bagi pengusaha usaha industri kecil, maka pihak pemerintah memberikan modal usaha, dan memberikan pelatihan (*Achievement Motivation Training*) bertujuan untuk meningkatkan kecakapan, dan keterampilan pelaku usaha, dan memberikan perlindungan kepada pengusaha industri kecil.

## Kelemahan konsep IKM<sup>26</sup>



### G. Metodologi Penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Sasmito, Laporan Pelatihan Kewirausahaan & Kolaborasi IKM dengan Posyantek, 2019.

<sup>27</sup> Rizqi Choironi, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Pengolahan Limbah Cangkang Kerang di PKBM Kridatama Desa Sendang Sikucing

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan atau menganalisis tentang Posyantek Madani dalam program Industri Kecil Menengah (IKM) dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

## 2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah:

### a. Observasi

Menurut Morris, observasi merupakan aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini saya langsung mengadakan pengamatan dan melakukan pencatatan terhadap objek penelitian yaitu program Industri Kecil Menengah (IKM) Posyantek Madani.

### b. Wawancara

Menurut W. Gulo, wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam

---

Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), h.17.

<sup>28</sup>Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)”, *at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, (Juli 2016), h.26.

hubungan tatap muka.<sup>29</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaan yang akan diajukan telah ditetapkan peneliti secara jelas dalam suatu bentuk catatan.

Adapun yang menjadi responden yaitu Ketua dan Pengurus Posyantek Madani, aparat Kelurahan dan masyarakat pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kelurahan Kedaleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan laporan yang didapat dari pihak Posyantek Madani serta data yang diperoleh berupa arsip, struktur pengurusan Posyantek Madani serta Pelaku IKM dan foto kegiatan yang dilakukan Posyantek Madani dan Pelaku IKM di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

1. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan secara wawancara, observasi dan alat lainnya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada informan yang dianggap mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat

---

<sup>29</sup>Nikmal Perdana, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah Oleh Bank Sampah Berlian Kelurahan Lenteng Agung", (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h.14.

melalui Usaha Kecil Menengah (IKM) yang berlangsung di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

Selain dengan wawancara, peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan, hal ini dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder dimaksudkan untuk mendukung data primer, karena diperlukan keterkaitan dengan teori-teori yang relevan.

Dalam hal ini peneliti akan memanfaatkan buku-buku, internet atau sumber data lain yang akan menunjang dari apa yang akan diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yakni, sejarah Posyantek Madani, program-program Posyantek Madani, fasilitas sarana prasarana Posyantek Madani dan sumber pendanaan Posyantek Madani Kelurahan Kedaleman.

BAB III Menjelaskan tentang masyarakat Kelurahan Kedaleman, yang akan dianalisis dan diuraikan sebagai hasil penelitian, bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab gambaran umum lokasi, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat.

BAB IV Menjelaskan tentang analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyantek dalam Program Industri Kecil Menengah (IKM) yang akan dianalisis dan diuraikan sebagai hasil dari penelitian, bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yakni program Posyantek Madani. Bentuk bentuk program Posyantek Madani, manfaat pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kedaleman, serta faktor pendukung dan penghambat pada Program Industri Kecil Menengah (IKM) di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

BAB V Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari rumusan masalah saran-saran.